



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERCEPATAN PEMULIHAN AKSES PULAU ENGGANO

Fitria Melinda

Analisis Legislatif Ahli Pertama
fitria.melinda@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah akses Pulau Enggano melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang diterbitkan pada 24 Juni 2025. Melalui Inpres ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melaksanakan pemulihan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, normalisasi garis pantai, serta pemanfaatan material pasir untuk perawatan area abrasi dan pengembangan pelabuhan. Selain itu, Kemenhub juga diminta mengawasi pengerukan alur pelayaran dan memperbarui data kondisi perairan dengan berkoordinasi bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut. Inpres ini berlaku hingga 31 Agustus 2025 sebagai batas waktu penyelesaian pemulihan Pelabuhan Pulau Baai. Berdasarkan kunjungan Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Pulau Baai pada tanggal 3 Juli 2025, ditemukan beberapa hal yang menghambat kinerja pelayaran dalam beberapa bulan terakhir.

Pulau Enggano berjarak sekitar 156 km dari Kota Bengkulu dan termasuk salah satu pulau terluar Indonesia dengan penduduk sekitar 4 ribu jiwa. Tingginya ketergantungan masyarakat pada transportasi laut untuk pemenuhan kebutuhan pokok, distribusi produk pertanian, serta penyaluran hasil perikanan menjadikan kelancaran jalur laut sangat krusial. Namun sejak Maret 2025, pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai akibat endapan pasir dari Samudra Hindia yang diperburuk gempa pada Mei telah memutus akses pelayaran. Situasi ini tidak hanya menghambat distribusi komoditas lokal dan pasokan kebutuhan pokok, tetapi juga menekan harga jual hasil pertanian dan perikanan serta mengurangi sumber pendapatan utama masyarakat, sehingga melemahkan aktivitas ekonomi di Enggano.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub bersama PT Pelindo Regional Bengkulu terus mempercepat pemulihan operasional Pelabuhan Pulau Baai. Dari sekitar 1,1 juta meter kubik sedimentasi yang menghambat jalur pelayaran, hingga kini sebanyak 263 ribu meter kubik pasir di sisi kiri alur sudah berhasil diangkat. Pengerjaan ini hampir mencapai target tahap pertama dengan kedalaman hingga minus 4 meter pada acuan *low water spring* (LWS). Langkah ini diharapkan dapat segera membuka kembali akses pelabuhan pada Juli 2025, sehingga kapal-kapal yang tertahan dapat kembali beroperasi. Setelah tahap ini selesai, pengerukan akan dilanjutkan ke bagian tengah dan kanan alur yang masih menyisakan endapan sekitar 800 hingga 900 ribu meter kubik pasir.

Sementara proses normalisasi jalur utama berlangsung, Ditjen Hubla mengoptimalkan skema langsiran untuk menjaga distribusi penumpang dan barang. Mekanisme ini menggunakan kapal kecil untuk memindahkan muatan dari kapal besar yang tertahan di kolam pelabuhan ke dermaga, sehingga mengatasi kendala pendangkalan yang menghalangi kapal besar bersandar. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, Kemenhub mengerahkan dua kapal negara, serta berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Bengkulu, Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut mengoperasikan kapal pengawas KP. Orca 05 untuk

memfasilitasi perpindahan warga Enggano ke Bengkulu. Di sisi lain, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai juga melakukan pemeriksaan kelaiklautan agar seluruh kapal memenuhi standar keselamatan sebelum diizinkan kembali berlayar.

Letak perairan Bengkulu yang langsung berhadapan dengan gelombang Samudra Hindia membuat wilayah ini memiliki risiko tinggi terhadap sedimentasi ulang. Tanpa pola pemeliharaan berkala, jalur pelayaran akan cepat mengalami pendangkalan kembali, sehingga memerlukan strategi berkelanjutan. Pengerukan rutin tetap menjadi langkah utama dalam mengendalikan sedimentasi di kolam pelabuhan dan jalur masuk. Selain itu, pembangunan atau pengoptimalan pemecah gelombang (*breakwater*) juga dapat dipertimbangkan untuk memperlambat kecepatan gelombang yang membawa material sedimen. Selain itu, koordinasi antara Kemenhub, pemerintah daerah, serta operator pelabuhan perlu diperkuat, tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga dalam menetapkan standar pemeliharaan jalur pelayaran jangka panjang. Dengan demikian, normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dalam menjaga konektivitas Pulau Enggano sekaligus memperkuat sistem logistik dan perekonomian salah satu wilayah terluar ini.

Atensi DPR

Permasalahan konektivitas Pulau Enggano akibat gempa dan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat selama hampir empat bulan terakhir telah menjadi perhatian Komisi V DPR RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kerjanya ke Bengkulu pada 3 Juli 2025. Inpres No. 12 Tahun 2025 menjadi dasar percepatan pemulihan alur pelayaran yang dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait. Untuk itu, penting bagi Komisi V DPR RI melakukan pengawasan atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam upaya percepatan pemulihan sebagai tindaklanjut atas Inpres No. 12 Tahun 2025 dengan target penyelesaian hingga 31 Agustus 2025 agar aktivitas distribusi dan ekonomi warga Enggano yang merupakan dalam wilayah terdepan, terluar dan tertinggal dapat kembali berjalan normal. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pemeliharaan rutin alur pelabuhan untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan pelayaran di Pulau Enggano, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sumber

antaranews.com, 2 dan 3 Juli 2025;
cnbcindonesia.com, 4 Juli 2025;
detik.com, 4 Juli 2025;
Kompas, 3 Juli 2025; dan
tempo.co, 29 dan 30 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*